



Perkembangan Kota Jombang masa kepemimpinan R.A.A. Soeroadiningrat 1910-1930

Ananta Dharma Kusuma

Universitas Negeri Malang, Kabupaten Jombang, anantadharna48@gmail.com

Abstract

During the Dutch colonial administration, administratively Jombang was part of the Mojokerto Afdeling and only in 1910 underwent a separation into its own afdeling with the first regent R.A.A. Soeroadiningrat. Jombang Regency was then able to regulate its own government thanks to the decentralization law that was formed by the colonial parties in the early 20th century. This paper focuses on the problem of the dynamics of the development of Jombang City from being previously part of the Mojokerto afdeling to getting the authority to regulate its own government, at a glance about the biography of the first Regent of Jombang, namely RAA Soeroadiningrat and the last one discussing the development of infrastructure in Jombang City during the RAA Soeroadiningrat period. This paper uses a historical method consisting of topic selection, heuristics, interpretation and historiography. The purpose of this paper is to provide information to the public about the history of Jombang City during the colonial period, especially in the period 1910-1930.

Keywords

Jombang; Regent; Development; Infrastructure

Abstrak

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, secara administratif Jombang merupakan bagian dari *Afdeling* Mojokerto dan baru di tahun 1910 mengalami pemisahan menjadi sebuah *afdeling* sendiri dengan bupati pertamanya R.A.A. Soeroadiningrat. Kabupaten Jombang kemudian dapat mengatur kehidupannya sendiri berkat adanya Undang-Undang desentralisasi yang dibentuk oleh pihak kolonial di awal abad ke-20. Tulisan ini memfokuskan permasalahan pada dinamika perkembangan Kota Jombang dari yang sebelumnya bagian dari *Afdeling* Mojokerto hingga mendapat kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri, selayang pandang mengenai biografi Bupati pertama Jombang yakni R.A.A Soeroadiningrat dan yang terakhir adalah membahas mengenai perkembangan infrastruktur Kota Jombang pada Masa R.A.A Soeroadiningrat. Tulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, interpretasi dan historiografi. Tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah untuk memberi informasi kepada publik mengenai sejarah Kota Jombang di masa kolonial khususnya pada rentang periode 1910-1930.

Kata kunci

Jombang; Bupati; Perkembangan; Infrastruktur

**Received:* 7 July 2021

**Accepted:* 29 January 2022

**Revised:* 24 December 2021

**Published:* 30 January 2022

Pendahuluan

Dalam historiografi, sejarah perkotaan menjadi salah satu tema kajian yang sangat menarik untuk dibahas. Berbagai topik dalam kajian sejarah ini diantaranya adalah ekologi, perkembangan administrasi, kondisi sosio-ekonomi masyarakat kota, arsitektur, budaya perkotaan, kota sebagai basis politik, dan masih banyak lagi topik kajian lainnya (Makkelo, 2017). Dalam historiografi perkotaan penulisan mengenai Jombang masih belum banyak yang mengangkatnya, tulisan-tulisan sejarah yang berkaitan dengan kota ini masih sangat terfokus pada penonjolan aspek kota santrinya seperti sejarah mengenai pondok pesantren, perjuangan santri yang ikut dalam melawan penjajah, biografi dan sepak terjang politik para ulama besar yang ada di wilayah Jombang.

Kajian mengenai Kota Jombang di bidang sejarah nonsantri lumayan sering dibahas oleh para peneliti dari berbagai macam kalangan sesuai dengan latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Beberapa tulisan yang dihasilkan diantaranya adalah artikel Pradipta & Sumarno (2019) yang berjudul Transportasi Kereta Api Jombang-Babat Tahun 1975-1981. Artikel ini berisi mengenai kemunduran dalam penggunaan jasa layanan perkeretaapian di Kota Jombang yang menyebabkan ditutupnya jalur Jombang-Babat secara resmi ditutup pada tahun 1981. Penyebab dari kemunduran tersebut dikarenakan kebijakan R. Soedirman bupati Jombang di tahun 1970an yang menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur khususnya dalam hal pembangunan jalan dan juga penggiatan pembangunan sarana terminal di wilayah Jombang. Hasil dari pembangunan ini memicu tren penggunaan transportasi bus dan juga angkot bagi masyarakat Jombang.

Artikel lain ditulis oleh Mahfud Fendy, Selirowangi, dan Sutardi (2020) Artikel ini berjudul Legenda Sendang Made Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. Artikel ini berisi uraian mengenai folklor dari masyarakat terkait dengan sejarah pelarian Prabu Airlangga saat pernikahannya dengan putri Dharmawangsa Teguh diserang oleh Haji Wura-Wari. Dikisahkan ketika melarikan diri Airlangga yang ditemani dayang-dayangnya sempat bersembunyi di wilayah apa yang sekarang dikenal sebagai Sendang Made. Disana Airlangga sempat tinggal selama 3 tahun dan membangun sendang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dikisahkan dalam pelariannya agar tidak diketahui musuh Airlangga melakukan penyamaran menjadi seorang pengamen. Sendang yang didirikan oleh Airlangga inilah yang kini dikenal oleh masyarakat sebagai Sendang Made dan dipercaya oleh masyarakat sekitar memiliki kekuatan supranatural yang tidak jarang sendang tersebut digunakan sebagai sarana ritual.

Wiwit Dyahwati (2016) menulis sebuah artikel yang berjudul Ornamen Candi Rimbi sebagai Inspirasi Pengembangan Motif Batik Kabupaten Jombang. Artikel tersebut membahas mengenai aspek sejarah dari Candi Arimbi sekaligus membahas mengenai pengembangan ornamen candi yang digunakan sebagai motif batik Jombang. Menurut sejarah candi tersebut merupakan tempat pendharmaan dari Ratu Majapahit yang bernama Tribhuwana Wijayottunggadewi (1328–1350 M), diduga candi ini didirikan pada tahun 1384 M. Candi ini memiliki teras berundak pada bagian kaki candi dan memiliki arah hadap barat.

Candi ini diisi oleh berbagai panil relief yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat, motif sulur-sulur tanaman, relief garudeya, sang setyawan, dll. Candi ini juga terdapat medalion dengan lambang surya Majapahit. Beberapa ornamen seperti sulur-sulur tanaman dan juga medalion digunakan sebagai inspirasi dalam membuat batik Arimbi Jombang.

Tulisan lain datang dari Kartika Wulan pada tahun (2016) dengan judul Sejarah Tari Kenya Made Sebagai Ikon Pariwisata Kabupaten Jombang. Artikel ini berisi mengenai sejarah perkembangan Tari Kenya Made dari kurun waktu 2005-2019 dari awal mula terbentuknya hingga kemundurannya. Dalam perkembangannya tari tersebut sangat terkenal hingga mendapat sorotan dari Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata karena berpotensi untuk menarik pengunjung ke wisata Sendang Made yang berada di Desa Made, Kec. Kudu, Kabupaten Jombang. Sayangnya eksistensi dari tari Kenya tidaklah berlangsung lama, hal ini disebabkan karena terhambatnya regenerasi dari penari sehingga tari Kenya Made menjadi jarang tampil di dalam acara festival Budaya. Proses kemunduran tersebut terjadi sejak tahun 2014.

Tulisan dari Ayu Lailiyul Mardiyah (2018) adalah Sejarah Ekologi Kota Jombang Pada Masa Raden Adipati Aryo Soeroadiningrat Tahun 1910-1950. Tulisan ini memfokuskan topik bahasan mengenai aspek ekologi kota Jombang, meskipun judul mengacu pada batasan tahun 1950. Dalam aspek pembahasan ekologi terlalu melebar hingga tahun 1970an. Kajian ini juga membahas mengenai dampak terbentuknya tata ruang Kota Jombang Terhadap kehidupan masyarakat dengan lingkup sosial, demografis, hingga religi. Selain itu, narasi yang ditulis juga memaparkan perjalanan singkat sejarah berdirinya Kota Jombang dari masa ke masa.

Tulisan di atas merupakan beberapa uraian mengenai tulisan sejarah yang membahas mengenai kajian-kajian di wilayah Jombang. Karena alasan minimnya informasi yang membahas mengenai sejarah perkembangan Kota Jombang maka penulis berinisiatif untuk menulis topik kajian tersebut dengan harapan bahwa tulisan/artikel ini bisa dijadikan sebagai sumber rujukan/ literatur guna mengetahui sejarah Kota Jombang khususnya pada periode 1910-1930. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yang pertama adalah bagaimana perkembangan administrasi Jombang dan kaitanya dengan Undang-Undang desentralisasi yang sudah dibuat?. Kedua, bagaimana profil dari Bupati Jombang pertama?, dan yang terakhir adalah bagaimana perkembangan infrastruktur Kota Jombang pada masa Kepemimpinan R.A.A. Soeroadiningrat?.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode sejarah yang menurut Kuntowijoyo (2018) terdiri dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Untuk pemilihan topik didasarkan pada kedekatan emosional dan juga kedekatan intelektual. Secara emosional Jombang merupakan tempat dimana penulis lahir, tumbuh dan berkembang. Tempat dimana penulis menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat, serta

kebanggaan sebagai warga Jombang. Kedekatan emosional inilah yang menyebabkan penulis mengambil topik bahasan mengenai sejarah kota Jombang. Karena dengan ringan hati mengambil topik kajian tersebut maka penulis tentunya dalam melakukan riset tidak merasa terbebani.

Heuristik adalah kegiatan dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang sesuai dengan topik kajian yang dibahas. Sumber yang dipakai dalam tulisan ini antara lain berupa surat kabar dari beberapa penerbit yakni *De Indische Courant*, *Soerabaiasch Handelsblad*, dan *De Expres* yang dapat diakses melalui *delpher.nl*, buku, jurnal, dan juga foto. Verifikasi adalah kritik untuk mempertanyakan kesejatan pada sumber sejarah yang sudah ditemukan. Kritik ini dibagi menjadi dua yakni eksternal dan internal. Kritik eksternal diperkenalkan untuk menguji tingkat autentitas dari sumber seperti bahan dan warna kertas, tinta, bahasanya, bentuk tulisan, dan lainnya.

Sedangkan kritik internal digunakan untuk menguji tingkat kredibilitas dari sumber, kritik ini dapat dilakukan dengan cara saling membandingkan isi/informasi yang terdapat pada sumber yang digunakan. Interpretasi adalah penafsiran penulis terhadap data-data yang sudah diperoleh. Interpretasi ini sangat rentan terhadap bias, meskipun sejarah tidak bisa tidak bisa seratus persen objektif dan sangat terkait dengan subjektivitas namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya prinsip kejujuran. Tahap terakhir adalah historiografi yakni penulisan sejarah.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Administrasi Kota Jombang Masa RAA Soeroadiningrat

Sebelum menjadi kota seperti saat ini, Jombang telah mengalami berbagai lika-liku dalam proses perkembangan administrasinya. Khususnya pada paruh kedua abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Melalui lembaran Pemerintah Hindia-Belanda no.553 Pemerintahan Dalam Negeri mengenai surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terbit pada 1 Desember 1910, menyatakan bahwasanya Jombang baru secara resmi mengalami pemisahan menjadi wilayah *afdeling* sendiri (*Soerabaiasch Handelsblad*, 29/03/1935). Meskipun demikian SK mengenai pemisahan sudah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial sejak tahun 1881. Sebelum SK tersebut turun Jombang berada dalam satu wilayah *afdeling* dengan Mojokerto di bawah Karesidenan Surabaya.

Wacana mengenai pemisahan Jombang dari *Afdeling* Mojokerto sudah mendapat pengajuan sejak tahun 1874. Meskipun demikian tanggapan ini tidaklah langsung di proses untuk mendapat persetujuan dari pihak pemerintah kolonial. Seiring berjalannya waktu baru pada tanggal 3 Desember 1880 wacana pemisahan mendapat tanggapan oleh Direktur Kehakiman. Setelah mengalami proses peninjauan ulang dan dengan berbagai pertimbangan pada akhirnya pihak pemerintah kolonial menyetujui wacana tersebut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan mengenai pemisahan *Afdeling* Mojokerto menjadi dua *afdeling* yakni Mojokerto dan Jombang pada tanggal 20 Maret

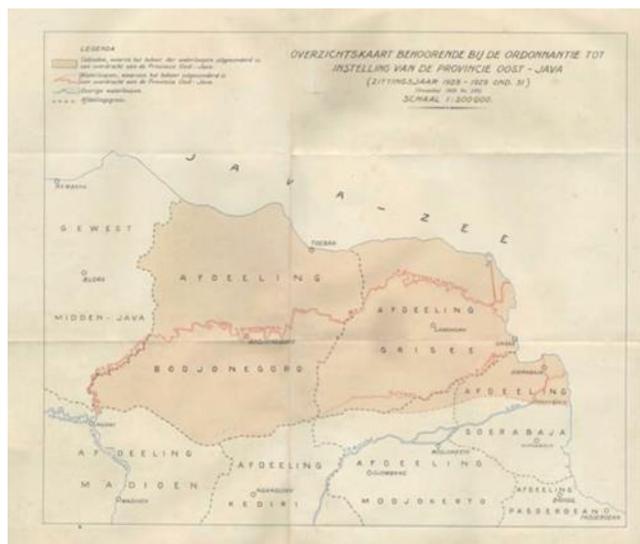
1881. Tanggal 30 April 1881 keluarlah *Besluit* No. 17 mengenai penetapan Patih *afdeeling* Jombang dan Raden Pandji Tjondro Wunito yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Wedana Mojokerto terpilih untuk menduduki jabatan tersebut (Mardiyah, 2018).

Meskipun dalam SK tersebut sudah keluar jabatan patih, akan tetapi dalam pengelolaan administrasi masih berada dalam lingkup departemen pemerintahan Mojokerto. Setelah secara resmi memisahkan diri maka diangkatlah bupati Jombang pertama yakni Raden Adipati Aryo Soeroadiningrat atau yang lebih akrab disapa oleh masyarakat Jombang dengan sebutan Kanjeng Sepuh. Beliau memimpin kota Jombang kurang lebih selama 20 tahun terhitung sejak pemisahan *Afdeling* Jombang pada tahun 1910 hingga pensiun tanggal 5 April 1930. Sebelum memerintah Kota Jombang Kanjeng Sepuh terlebih dahulu sempat memimpin daerah Sedayu sebagai bupati (*Soerabaiasch Handelsblad*, 01/07/1936).

Di masa R.A.A. Soeroadiningrat Jombang mendapat hak berupa pelimpahan wewenang otonomi daerah. Pelimpahan wewenang ini tidak dapat dilepaskan dari adanya Undang-Undang desentralisasi yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda pada paruh pertama abad ke-20, lebih tepatnya dibentuk pada tahun 1903 yang kemudian mulai diterapkan di tahun selanjutnya. Undang-Undang tersebutlah yang menjadi dasar hukum dalam pelimpahan otonomi daerah (Basundoro, 2012). Undang-Undang desentralisasi kemudian mengalami beberapa perkembangan yakni pada tahun 1905 dan 1922. Alasan yang melatarbelakangi dikeluarkannya Undang-Undang tersebut karena kebutuhan dari berbagai wilayah di Hindia Belanda menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya zaman.

Pemerintahan kolonial Belanda yang bersifat sentralistis tidak mampu untuk menyamaratakan kebijakan untuk diterapkan di seluruh wilayah Hindia Belanda kala itu. Oleh karena itu agar wilayah-wilayah yang memiliki kebutuhan berbeda dapat terpenuhi, maka dikeluarkanlah Undang-Undang tersebut dengan pelimpahan wewenang otonomi kepada wilayah-wilayah yang dirasa layak untuk mendapatkannya. Puncak dari pembaharuan Undang-Undang ada pada tahun 1922 dengan beberapa kebijakan diantaranya ialah *Provincie Ordonantie dan Regentschap Ordonantie* (ANRI, 2004). Kebijakan kedua inilah yang menjadikan Kabupaten Jombang mendapat pengukuhan hak desentralisasinya.

Dengan dikeluarkannya lembaran negara Hindia Belanda Tahun 1928 No. 299 yang berisi mengenai pembentukan pemerintahan baru dengan pemberian kewenangan desentralisasi di Kabupaten-kabupaten di Jawa Timur. Atas dasar inilah Kabupaten/ Kota Jombang mengalami penunjukkan sebagai persekutuan hukum yang berdiri sendiri (*zelfstanding gemeenschap*). Salah satu dari pasal tersebut menjelaskan penyerahan benda-benda bergerak dan tidak bergerak kepada pemerintah Kabupaten Jombang seperti Jalan-jalan umum dengan bangunan-bangunan yang termasuk di dalamnya, lapangan, saluran pembuangan, penyebrangan, rumah-rumah pemadaman kebakaran, sumur artesis, tempat pemakaman umum, dan bangunan pasar (Mardiyah, 2018).



Gambar 1. Peta Provinsi Jawa Timur, 1928. Tanda panah merujuk pada afdeeling Jombang
(sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2004)

Selayang Pandang Biografi RAA Soerodiningrat

Kanjeng Sepuh merupakan panggilan kesayangan dari warga Jombang untuk Raden Adipati Arya Soerodiningrat. Beliau menjabat sebagai Bupati Jombang sejak 1910 hingga 1930. Menurut silsilah beliau merupakan keturunan ke-15 dari Prabu Brawijaya V. Kanjeng Sepuh merupakan putera adipati Sedayu (1855-1884) bernama R.A.A. Soerodiningrat IV. Nama beliau semasa kecil adalah Bagus Badrun, sebagai putra seorang adipati, maka Bagus Badrun harus menjalani proses pendadaran guna memimpin bangsanya. Sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat, beliau masuk ke Pesantren Giri untuk menuntut ilmu keagamaan. Bagus Badrun juga sempat mendalami ilmu beladiri dengan masuk ke Perguruan Gilingwesi (Nasrulloh, dkk 2010).



Gambar 2. R.A.A. Soerodiningrat
(sumber: Nasrulloh, Soekarno & Yusuf, 2010)

Beliau kemudian memulai karir resminya pada bulan Maret 1883 sebagai penulis tidak dibayar wedono di distrik Mojorejo. Tujuh tahun kemudian beliau ditunjuk menjadi seorang jaksa di wilayah Sedayu, Kemudian pada tanggal 5 Maret 1894 hingga akhir tahun 1910 beliau diangkat menjadi seorang bupati Sedayu menggantikan sang ayah yakni Pangeran Bupati Soeroadiningrat IV (Soerabaiasch Handelsblad, 31/03/1930). Baru ketika menjabat sebagai Bupati Sedayu, Gresik Bagus Badrun mendapat gelar nama R.A.A. Soeroadiningrat V. Dalam memimpin masyarakat beliau memiliki prinsip mengikuti arus air tapi jangan sampai terbawa di dalamnya, artinya mengikuti kemauan Belanda tetapi di satu sisi tetap berjuang dan bekerja untuk rakyat. Masa awal jabatan R.A.A. Soeroadiningrat V sebagai Bupati Jombang ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan pendopo Kabupaten Jombang tanggal 22 Februari 1910 dan penanaman pohon beringin di halaman pendopo. Serta pohon beringin di lokasi yang kini dikenal dengan nama Ringin Contong.

Menurut pandangan masyarakat Jawa pohon beringin disimbolkan sebagai lambang pengayoman. Dalam konteks ini adalah pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Sosok Kanjeng Sepuh juga dikenal sebagai seorang tokoh pluralis dan moderat. Hal tersebut bisa dilihat dari ruang kerja beliau yang terdapat patung Budhis sebagai simbol Agama Buddha dan Batara Wisnu sebagai simbol Agama Hindu. Meskipun demikian Kanjeng Sepuh bukanlah penganut sinkretis agama. Dalam relasi pemerintahan, usaha untuk mendekati pihak kolonial digunakan oleh Bupati Jombang pertama sebagai media penghubung. Tujuan Kanjeng Sepuh melakukan hal tersebut untuk melancarkan rencana tersembunyinya dalam memakmurkan rakyat Jombang.

Ketika memimpin Jombang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh beliau sebisa mungkin tidak memberatkan kehidupan rakyatnya, semisal masalah pemungutan pajak yang mencekik. Sering di sela-sela tugas sebagai seorang bupati, Kanjeng Sepuh secara sengaja bergabung dengan orang-orang Belanda dan asing lainnya di sebuah komunitas *society* yang letaknya berada di sebelah selatan kantor pos sekarang. Kegiatan dari komunitas tersebut di antaranya adalah melakukan olahraga bersama di rumah-rumah bowling (sekarang menjadi kantor telkom Jombang) dan billiard (Nasrulloh, dkk 2010).

Setelah masa jabatan Kanjeng Sepuh sebagai bupati berakhir di tahun 1930, jabatan tersebut kemudian diserahkan kepada putra ketiga, yakni Raden Adipati Arya Setjoadingrat. Kehebatan serta keuletan Kanjeng Sepuh semasa menjabat sebagai bupati tidak bisa dilupakan oleh berbagai kalangan. Masyarakat Jombang sangat menghormati Kanjeng Sepuh sebagai sosok yang mengayomi dan mengerti akan kebutuhan rakyatnya. Ketenaran Kanjeng Sepuh bahkan mencakup jenjang birokrasi pemerintah Kabupaten Jombang. Semasa pensiun Kanjeng Sepuh bahkan sering dimintai nasehat oleh para pegawai negeri yang sedang menjabat pada saat itu (De Indische Courant, 03/01/1936). Kanjeng Sepuh tutup usia pada tanggal 20 April 1946. Pada saat

kepergian Kanjeng Sepuh, banyak dari berbagai kalangan termasuk teman sejawat yang merasa kehilangan.

Perkembangan Infrastruktur Kota Jombang Pada Masa R.A.A Soerodiningrat

Sesudah pemisahan *Afdeling* Jombang diresmikan pada tahun 1910, berbagai infrastruktur dibangun guna memenuhi kebutuhan kota ini seperti kebutuhan politik dan juga pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur tersebut dimotori oleh berbagai pihak baik oleh pemerintah maupun swasta. Beberapa perkembangan infrastruktur yang terjadi di masa pemerintahan R.A.A. Soerodiningrat yang pertama adalah pembangunan pendopo di sebelah timur alun-alun. Pendopo pada saat itu digunakan sebagai rumah dinas milik bupati sekaligus kantor pemerintahan. Bangunan tersebut masih berfungsi hingga saat ini dan digunakan sebagai kantor bupati Jombang. Beberapa fungsi dari pendopo ini diantaranya sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan/acara kenegaraan, tempat untuk bersuka cita dengan menggelar festival pada saat memperingati ulang tahun kelahiran ratu Belanda, sebagai tempat untuk berdialog dengan masyarakat, hingga digunakan sebagai tempat untuk melakukan pengobatan yang diadakan secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu (Nasrulloh, dkk 2010).

Alun-alun Jombang, pada saat itu digunakan sebagai ruang terbuka untuk publik. Jadi alun-alun dapat didefinisikan sebagai lapangan terbuka yang luas serta berumput dan di sekitarnya dikelilingi oleh jalan jadi dalam penggunaannya tidak ada batasan fungsi dan masyarakat bebas menggunakannya (Putra, dkk., 2015). Beberapa kegiatan yang diuraikan dalam surat kabar semasa dan juga beberapa literatur diantaranya sebagai tempat berkumpul, peringatan-peringatan, acara kenegaraan, rekreasi, tempat digelarnya pasar malam, tempat untuk berolahraga, dan lainnya (De Express, 22/10/1913; De Indische Courant 24/12/1927; Fitria, 2017).

Kedua adalah dibangunnya masjid di sebelah barat alun-alun masjid ini juga dibangun di awal pemerintahan Kanjeng Sepuh bersamaan dengan dibangunnya pendopo Jombang. Masjid ini sekarang dikenal oleh masyarakat Jombang sebagai Masjid Agung Jami'. Masjid Agung dan Pendopo Bupati Jombang berseberangan dan menghadap terbuka ke lapangan kosong yang disebut alun-alun. Perpanjangan sumbu tersebut dalam pandangan Jawa merepresentasikan adanya konsep relasi antara manusia dengan Tuhan, relasi antara manusia (penguasa) dengan masyarakat, dan relasi antara manusia dengan alam (Depari dalam Fitria, 2017: 16).

Ketiga adalah Pembangunan sarana transportasi kereta api. Sebenarnya dalam pembangunan jalur kereta api di Kota Jombang sudah berlangsung sebelum masa pemerintahan Bupati R.A.A. Soerodiningrat V. Pembangunan jalur kereta api Jombang di mulai sejak tahun 1899 dengan pihak penerima konsesi yaitu *Babat-Djombang Stroomtram Maatchappij* (BDSM). Maskapai tersebut kemudian membangun jalur kereta api lintas Babat-Jombang di tahun 1889-1902 serta pembangunan rel Jombang-Lamongan yang selesai dibangun pada 1902 (Pradipta & Sumarno, 2019). Selain itu,

perusahaan yang cukup berjasa dalam pembangunan jalur rel kereta api Jombang adalah pihak *Kediri Stoomtram Maatschappij* (KPM) dengan memperoleh konsesi pada tahun 1894, 1895, 1898 untuk pembangunan jalur lintas Jombang, Blimbing, dan Jengkol (Pradanan & Wisnu, 2018).

Ketika R.A.A. Soeroadiningrat menjabat sebagai bupati, perkeretaapian di Kota Jombang sempat mengalami dinamika perkembangannya yaitu ketika pada tanggal 1 desember 1916 perusahaan *Babat–Djombang Stroomtram Maatchappij* (BDSM) diambil alih oleh perusahaan *Staatsspoorwegen* (SS). Sementara jalur kereta api segmen stasiun Jombang–stasiun Jombang kota diakuisisi dari *Kediri Stroomtram Maatchappij* pada tanggal 1 November 1918, kemudian pada tahun 1921 dibangunlah percabangan jalur dari stasiun Krian menuju stasiun Ploso (Pradipta & Sumarno, 2019).

Keempat adalah pembangunan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam, pada masa kepemimpinan Kanjeng Sepuh, berdirilah sebuah pondok pesantren yang namanya sangat terkenal baik di dalam Jombang maupun di luar. Pondok tersebut bernama Mamba’ul Ma’arif yang dibangun oleh KH. Bisri Syansuri pada tahun 1917 di daerah Denanyar. Sebelum pondok tersebut berdiri Jombang sudah memiliki beberapa pondok pesantren yang gaungnya sangat tersohor yakni Pondok Pesantren Bahrul Ulum 1838, Darul Ulum 1885, dan Tebu Ireng 1899 (Nanang, 2006).

Menindak lanjuti pembangunan pondok di Denanyar, Kiai Bisri banyak menyoroti permasalahan mengenai kaum perempuan yang termarginalkan. Masyarakat sekitar kebanyakan masih memandang remeh unsur pendidikan bagi anak perempuannya. Kiai Bisri beserta istri kemudian mulai melakukan sebuah inovasi pada tahun 1919 dengan membuka kelas khusus bagi para santri putri. Selain itu, di tahun 1923 Kiai Bisri mendirikan Madrasah Salafiyah yang diberi nama Mabadi’ul Huda. Madrasah ini hanya untuk santri putra. Setelah beberapa tahun berlangsung pada akhirnya Kiai Bisri membuka madrasah bagi santri putri di tahun 1930 (Ulum, 2017).

Kelima adalah perkembangan pembangunan sarana kesehatan. Pada tahun 1921 berdirilah sebuah rumah sakit yang berada di daerah Ngoro. Rumah sakit ini merupakan milik dari Bank Kolonial. Akan tetapi, secara pengelolaannya berada dalam naungan Rumah Sakit Misionari Modjowarno yang sudah berdiri sejak 1894. Dengan demikian rumah sakit tersebut berstatus sebagai rumah sakit pembantu dengan pusat utamanya berada di daerah Mojowarno. Pembangunan sarana kesehatan kian berkembang dengan adanya poliklinik di Mojoagung yang didirikan oleh Zr. Hulzebos sejak 1 November 1924 dan Sumobito di tahun 1925. Secara pendanaan poliklinik tersebut turut dibiayai oleh pabrik gula dari perusahaan *Nederl. Handel-Maatschappij* (Ketel, 1934).

Ketika masa jabatan Bupati R.A.A Soeroadiningrat belum berakhir. Atas seizin pemerintah kolonial R.A.A Soeroadiningrat mendirikan tempat pelayanan kesehatan masyarakat yang terletak di Jalan Wahid Hasyim, sebelah utara Lembaga Pemasarakatan atau lebih tepatnya berada di depan kantor pos sekarang (Nanang, 2015). Perkembangan sarana yang disediakan ini sungguh bermanfaat bagi masyarakat

mengingat Jombang sudah berdiri sendiri sejak 1910, alhasil sudah sepatutnya kota Jombang memiliki jaringan pelayanan kesehatannya yang baik.

Kesimpulan

Kota Jombang memiliki sejarah yang cukup panjang terkait dengan pelimpahan wewenang guna mengatur pemerintahannya sendiri. Sebelum tahun 1881 Jombang merupakan bagian dari *afdeeling* Mojokerto, meskipun SK mengenai pemisahan ini sudah keluar akan tetapi pemisahan ini baru dapat terwujud di tahun 1910 dengan bupati pertamanya R.A.A. Soeroadiningrat atau yang lebih akrab disapa Kanjeng Sepuh oleh masyarakat Jombang. Adanya Undang-Undang Desentralisasi yang mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial pada awal abad ke-20 menyebabkan Jombang mendapat pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Dalam catatan sejarah pemerintahan Kanjeng Sepuh, beliau merupakan sosok bupati yang hebat. Kemampuan beliau dalam memimpin Jombang bahkan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan seperti masyarakat biasa, teman sejawat hingga pemerintah kolonial. Ketika beliau memerintah dari tahun 1910-1930 terjadi perkembangan infrastruktur kota baik di bidang layanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga religi.

Daftar Rujukan

- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2004). *Citra Jawa Timur dalam arsip*. Jakarta.
- Basundoro, P. (2012). *Pengantar sejarah kota*. Yogyakarta: Ombak.
- De Expres*, 22 Oktober 1913.
- De Indische Courant*, 24 Desember 1927.
- De Indische Courant*, 3 Januari 1936.
- Dyahwati, W. (2016). Ornamen Relief Candi Rimbi Sebagai Inspirasi Pengembangan Motif Batik Kabupaten Jombang. *Jurnal Seni Rupa*, 4(01).
- Fendy, M., Selirowangi, N. B., & Sutardi, S. (2020). Legenda Sendang Made Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. *PENTAS: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1), 111-119.
- Fitria, L. (2017) *Analisis fungsi struktur alun-alun Kota Jombang serta kawasan sekitar sebagai kawasan bersejarah* (Thesis Dissertation). Institut Pertanian Bogor. Retrived from <<https://docplayer.info/49998947-Analisis-fungsi-dan-struktur-alun-alun-kota-jombang-serta-kawasan-sekitar-sebagai-kawasan-bersejarah-lum-atul-fitria.html>>
- Ketel, A. P. (1934). 1894 tot 1934 Veertig jaren medische zending, Zending-Ziekenhuis te Modjowarno.
- Kuntowijoyo, (2018). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Makkelo, I, D. (2017). Sejarah Perkotaan: sebuah tinjauan historiografis dan tematis. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 12(2), 83-101.
- Mardiyah, A. L. (2018). *Sejarah ekologi Kota Jombang pada masa Raden Adipati Aryo Soeroadiningrat tahun 1910-1950* (Thesis Dissertation). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Retrived from <<http://digilib.uinsby.ac.id/24815/>>

- Nasrulloh, F. D., Soekarno & Yusuf, W. (2010). *Biografi Bupati Jombang*. Jombang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
- Nanang. (2006). *Jombang dalam wisata sebuah buku panduan*. Jombang: Kantor Perbupora, FPI & IPSBI Cabang Jombang.
- Nanang. (2015). *Sekilas berdirinya Bapelkes RSD Jombang*. Jombang: Bapelkes RSD Jombang.
- Pradana, G. R., & Wisnu. (2018). Perkembangan Kediri Stoomtram Maatschappij tahun 1895-1930. *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 6(2), 205-216.
- Pradipta, A. B. R., & Sumarno. (2019). Transportasi Kereta Api Jombang-Babat tahun 1975-1981. *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 7(3), 1-11.
- Putra, A.D., Azwir, M., Oktaviany, V., & Nilamsuc, R. (2015). Kajian transformasi bentuk dan fungsi Alun-Alun Bandung sebagai ruang terbuka publik. *Jurnal Reka Karsa*, 3(3), 1-13.
- Soerabaiasch Handelsblad*, 31 Maret 1930
- Soerabaiasch Handelsblad*, 29 Maret 1935
- Soerabaiasch Handelsblad*, 7 Januari 1936
- Ulum. M. B. (2017). KH. M. Bisri Syansuri dan Pembaruan Pesantren. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 195-212.
- Wulan, K., & Septina, A. (2016). Sejarah Tari Kenya Made sebagai ikon pariwisata Kabupaten Jombang. *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3).